

PRIMORDIALISME DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PERIODE 2017-2022

Edha Romadatama, Anyualatha Haridison

Abstract

Until this is still a lot of people who choose a candidate leader based on ethnic or religious. Thus the formulation of this research problem is how the behavior of the electorate of the South Arut Subdistrict in the election of Regent and Vice Regent period 2017-2022 in West Kotawaringin regency, and what factors encourage the people of South Arut Subdistrict to behave primordially in the election of Regent and Vice Regent West Kotawaringin period 2017-2022.

The purpose of this research is to know and analyze the behavior of choosing primordial of South Arut Subdistrict in the election of Regent and Vice Regent of Kotawaringin Barat period 2017-2022. The research type is qualitative with descriptive approach. Data collection techniques using interview and documentation techniques. Data analysis conducted is qualitative data analysis with descriptive approach.

The results showed that the people of South Arut in Kotawaringin Barat District in the election of regional heads became primordial voters because of the strong ethnic and religious influence inherent in the community. The researcher recommends that the people of South Arut should be able to meet the election in accordance with the supposed and select the candidate for the quality. In order to create a better government for West Kotawaringin later.

Keywords: *Primordialism, Primordial Voters*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa atau kelompok etnis. Keberagaman suku bangsa atau etnis ini di suatu sisi membawa pengaruh positif untuk kekayaan kebudayaan, seni, serta dinamika sosial kehidupan masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain keberagaman etnis menjadi bumerang bilamana di dalam masyarakat masih terdapat individu yang mengagung-agungkan sikap primordialisme. Primordialisme adalah rasa kesukuan yang berlebihan, yang diikuti dengan sikap ,memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, seperti tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan timbulnya prasangka yaitu kepribadian, tingkat intelegensi, dan faktor lingkungan. Semakin tinggi tingkat intelegensi seseorang maka ia akan bersifat dan bersikap lebih kritis sehingga lebih sukar untuk berprasangka. Sedangkan semakin rendah tingkat intelegensi seseorang maka memiliki kecenderungan lebih mudah untuk berprasangka. Faktor kondisi lingkungan yang tidak mapan juga berpeluang untuk menimbulkan prasangka. Yang disebut dengan kondisi lingkungan yang tidak mapan disini ialah kondisi lingkungan dimana terdapat persaingan untuk mencapai akumulasi materiil tertentu (persaingan ekonomi), persaingan untuk meraih status sosial tertentu (persaingan

sosial), serta pada suatu lingkungan atau wilayah dimana norma-norma dan tata hukum dalam kondisi goyah.

Faktor kepribadian dan keadaan frustrasi dari beberapa orang atau kelompok sosial tertentu merupakan kondisi yang cukup berpeluang untuk menimbulkan tingkah laku agresif. Faktor ini juga dapat berpotensi menjadi pemicu timbulnya prasangka dan diskriminasi. Para ahli beranggapan bahwa prasangka lebih dominan disebabkan oleh tipe kepribadian orang-orang tertentu. Tipe *authoritarian personality* atau kepribadian *authoritarian* adalah sebagai ciri kepribadian seseorang yang penuh dengan prasangka, dengan ciri-ciri bersifat konservatif dan tertutup. Perbedaan latar belakang keyakinan, kepercayaan, agama, perbedaan pandangan politik, ekonomi dan ideologi juga turut menjadi faktor pemicu timbulnya prasangka dan diskriminasi.

Cara pandang individu terhadap etnis lain dan etnis tertentu akan menentukan bagaimana ia bersikap terhadap individu atau kelompok yang berasal dari etnis tersebut. Yang selanjutnya cara pandang tersebut biasanya akan diturunkan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya memiliki pola pikir dan cara pandang yang secara nyata cenderung sama dengan orang tuanya. Apabila cara pandang negatif yang ditransfer oleh orang tua kepada anak-anaknya, maka pemikiran-pemikiran dan pandangan negatif pula yang akan diadopsi oleh anak-anaknya. Dalam ranah pergaulan sosial yang lebih luas hal itu berpotensi menghancurkan kesatuan dan memperburuk hubungan sosial di antara kedua etnis yang berbeda.

Proses pengambilan keputusan di negara ini sering dilakukan berdasarkan pendekatan budaya (*culture approach*). Hal tersebut dilakukan karena banyak para pemikir kita beranggapan bahwa masyarakat lokal yang mengetahui dengan pasti apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus berdasarkan pendekatan budaya terhadap masyarakat yang bersangkutan.

Namun, pada masa orde baru pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan budaya mulai tercederai. UU No. 5 Tahun 1974 yang merumuskan supremasi pusat atas daerah-daerah merupakan awal dari semuanya. UU No. 5/1974 tersebut kemudian dikeluarkan oleh UU No. 5/1979 mengenai pemerintahan desa, yang menyeragamkan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Kedua Undang-undang yang saling menyempurnakan tersebut semakin memperkuat cengkeraman pusat terhadap daerah.

Melalui kedua UU di atas, Soeharto menerapkan penyeragaman terhadap seluruh desa yang ada di Indonesia. Dengan alasan untuk memperlancar pembangunan nasional, daerah dipaksa untuk bertindak sesuai keputusan dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut juga memaksa pemerintah di daerah untuk meninggalkan sistem pengambilan keputusan yang berdasarkan pendekatan budaya (*culture approach*). Secara perlahan namun pasti budaya lokal mulai terkikis. Para masyarakat dan elite lokal mulai dicekoki dengan istilah-istilah modernisasi dan demokratisasi, tentunya dengan iming-iming kehidupan yang lebih baik nasional maupun internasional.

Setelah berjalan sekitar lima belas tahun, prospek penyeragaman tersebut ternyata tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Satu hal yang secara pasti didapatkan oleh masyarakat adalah Budaya lokal yang mulai terkikis bahkan hampir hilang. Pembangunan nasional yang semula menjadi tujuan penyeragaman juga tidak tercapai dengan baik.

Untunglah disela-sela proses pengikisan budaya lokal yang ada, rezim orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto jatuh pada tahun 1998. Seiring jatuhnya masa orde baru, UU tentang supremasi pusat terhadap daerah dan penyeragaman terhadap desa akhirnya dicabut. Daerah diberikan kembali kebebasan untuk memelihara budaya lokal dan melakukan pengambilan kebijakan yang berdasarkan Pendekatan Budaya.

Banyak daerah yang menyebutkan hal tersebut dengan sukacita. Masyarakat di daerah berharap agar budaya mereka dapat dipelihara kembali. Sebab mereka merasa bahwa kehidupan mereka justru lebih baik ketika masih menjaga tradisionalisme. Pemerintah daerah dan elite lokal pun tidak ketinggalan untuk mencoba menerapkan kembali kebijakan yang berbau Pendekatan Budaya.

Setelah masuk pada masa reformasi, maka hal yang hangat diperbincangkan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah Demokrasi. Menghadapi proses globalisasi dunia, pemerintah Indonesia dipaksa untuk menerapkan sistem demokrasi dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut harus dilakukan agar Indonesia semakin dihargai oleh dunia internasional dan dipermudah dalam urusan diplomasi. Daerah pun kembali dipaksa untuk menerapkan sistem demokrasi. Penerapan sistem demokrasi diikuti oleh proses desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah, di mana para kepala daerah juga akan diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan siapa yang layak untuk jadi pemimpin mereka lewat proses Pilkada (Pemilihan Kepala daerah).

Tinjauan Pustaka

1. Primordialisme

Primordil atau Primordialisme berasal dari kata bahasa Latin *primus* yang artinya pertama dan *ordiri* yang artinya tenunan atau ikatan. Primordialisme berarti pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Primordialisme sebagai identitas sebuah golongan atau kelompok sosial merupakan faktor penting dalam memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang bersangkutan dalam menghadapi ancaman dari luar. Namun seiring dengan itu, primordialisme juga dapat membangkitkan prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial lain. Primordialisme muncul akibat adanya perbedaan ikatan-ikatan dan keyakinan dari suku bangsa, agama, ras dan kebudayaan yang berbeda. Primordialisme dapat menyebabkan seseorang memiliki rasa kesetiaan yang tinggi terhadap budayanya. Sikap primordialisme merupakan sikap yang sangat sulit untuk dihilangkan dari diri seseorang karena biasanya terbentuk sejak seorang individu masih sangat kecil dalam lingkungan keluarga.

2. Teori Politik Pemilih

Keputusan politik untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpi jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan. Perilaku pemilih juga syarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan

pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi yang sama dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka. Hiw Melwit dalam pendekatan dalam memahami perilaku pemilih (2002), menyatakan bahwa perilaku pemilih merupakan pengambilan keputusan yang bersifat instan, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari faktor-faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusan memilih, seperti faktor partai politik yang mendukung pasangan calon, citra kandidat ataupun figur kandidat tersebut.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati secara langsung masuk dalam desain pemilihan umum kepala daerah secara serentak sebagai solusi dari demokrasi perwakilan yang selama ini telah berjalan cukup lama. Rakyat di suatu daerah dapat memilih sendiri pemimpinnya berdasarkan asas yang berlaku. Dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2014 bab 1 pasal 1 dinyatakan: Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum, dalam hal ini pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati) dimana kedaulatan rakyat langsung menjadi penentu siapa yang akan memimpin daerahnya melalui penggunaan hak politik, salah satu cara yaitu ikut serta dalam pemilihan.

4. Politik Primordialisme Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kotawaringin Barat

Secara teoritis munculnya politik identitas merupakan fenomena yang disebabkan oleh banyaknya faktor seperti : aspek struktural berupa disparitas ekonomi masa lalu dan juga masih berlanjutnya kesulitan ekonomi saat ini yang telah memberikan alasan pembenaran upaya pemisahan diri sebuah kelompok primordial yang bertautan dengan aspek keterwakilan politik dan institusional. Dalam konteks keterwakilan politik belum meluas dan melembaganya partisipasi dan keterwakilan politik masyarakat secara komprehensif telah memicu munculnya kebijakan yang diskriminatif dan eksklusif yang pada akhirnya memperkuat alasan kebangkitan politik identitas. Konsep- konsep tentang identitas dan bahkan identitas itu sendiri semakin dipandang sebagai akibat dari adanya sebuah interaksi yang dinamis antara konteks (dan sejarah) dengan *construct*. Eriksen (1993) telah menunjukkan sebagian dari proses-proses yang terlibat dalam konstruksi histories identitas etnik dalam kasus orang-orang India yang bermigrasi ke Mauritius dan Trinidad (Mauneti, 2004:25).

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, pengaruh yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya (Arikunto, 2006:129).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, karena peneliti ingin Mendeskripsikan bagaimana respons masyarakat Kotawaringin Barat terhadap primordialisme. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena merupakan daerah asal penulis dan banyaknya perbedaan budaya di sana.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Menurut Moloeng (2012), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian digunakan beberapa teknik yaitu: a. Observasi; b. Wawancara; dan c. Dokumentasi.

Pembahasan

1. Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat

Untuk mengetahui perilaku masyarakat di Kecamatan Arut Selatan penulis menggunakan pendekatan secara sosiologis. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik social dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (pekerjaan dan pendidikan) dan latar belakang sosiologis (seperti agama, etnik, wilayah) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Dilihat dari pengamatan peneliti secara langsung masyarakat di Arut Selatan masih banyak yang menjadikan agama, etnis dan pekerjaan sebagai tolak ukur didalam melakukan pemilihan kepala daerah. Perilaku masyarakatnya sangat tertutup terhadap hal lain, maksudnya para pemilih hanya fokus terhadap kandidat pilihan mereka atau yang sesuai dengan ideologi mereka. Mereka sangat bersemangat dan mendukung penuh calon pilihan mereka tanpa menghiraukan calon lainnya. Hal ini yang menunjukkan perilaku masyarakatnya masih belum berdasarkan politik modern, yang kemudian para calon terpilih memanfaatkan hal tersebut sebagai strategi politik yang menguntungkan di dalam politikanya.

2. Penyebab Masyarakat Pemilih Menjadi Primordial Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kotawaringin Barat

Dari data yang di kumpulkan peneliti dan dari kondisi di lapangan yang diamati secara langsung penyebab yang mendorong masyarakatnya sebagian besar menjadi pemilih primordial adalah dari faktor agama, karena mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Kemudian dari suku juga tidak merata karena sebagian besar penduduknya adalah melayu. Banyak terdapat suku lain namun hanya sebagian kecil dan suku – suku campuran lainnya. Terakhir yang mempengaruhi primordial di Kotawaringin Barat adalah pendidikan masyarakatnya. Secara umum masyarakat Kotawaringin Barat tidak ada yang buta huruf, namun pendidikan strata ke atas masih rendah, terutama di dalam bidang politik. Kurangnya pemahaman akan politik membuat masyarakatnya sebagian besar menjadi pemilih primordial karena di dasari kuatnya agama dan etnis masyarakatnya. Dari segi ideologi juga menjadi salah satu sebab masyarakat Arut Selatan menjadi primordial karena masyarakatnya berpikir hanya akan memilih calon yang akan menguntungkan mereka tanpa mengetahui dampak yang terjadi ke depannya.

3. Faktor Utama Penyebab Pemilih Primordial di Kotawaringin Barat

Dari hasil penelitian yang di lakukan, ada beberapa faktor penyebab primordialisme pada masyarakat Kotawaringin Barat yang jelas terlihat dan susah untuk di hilangkan di masyarakat antara lain :

- a. Agama, Agama menjadi poin utama faktor primordialisme di masyarakat karena dianggap sebagai pemersatu suatu kelompok, sebagai patokan dalam hubungan mereka nantinya. Menurut Charles Horton Cooley (2010:221), *in groups* atau kelompok primer sangat penting peranannya dalam menentukan kepribadian manusia.
- b. Etnik, Poin kedua faktor primordialisme di Kotawaringin Barat adalah etnik masyarakatnya. Hal tersebut terjadi karena kesatuan kebudayaan terbentuk karena adanya loyalitas yang tinggi dari warga pemilik kebudayaan itu sendiri, bukan ditentukan oleh pihak luar yang pengaruhnya tergolong rendah.

Penutup

1. Kesimpulan

- a. Masyarakat di kecamatan Arut Selatan menunjukkan perilaku pemilih yang terfokus pada pihak tertentu. Mereka akan mendukung penuh calon kandidat pilihan mereka tanpa membandingkan dengan calon kandidat lainnya yang mungkin memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih baik.
- b. Ternyata masyarakat di Kecamatan Arut Selatan kecenderungan masih menjadi pemilih primordial di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat.
- c. Pemilihan yang di lakukan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat secara keseluruhan masih di temukan faktor-faktor primordialisme yang mendasari alasan mereka memilih para calon, yaitu agama dan etnis secara garis besar, kemudian faktor lain seperti ikatan bisnis, pekerjaan, dan perekonomian. Ternyata di era globalisasi saat ini masih terdapat politik primordial yang bisa mempengaruhi pola pikir masyarakatnya. Pola pikir masyarakat modern masih bisa di pengaruhi yang kemudian menjadi pemilih primordial yang nantinya akan

berdampak pada berkembangnya politik di kota para pemilih itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa demokrasi di Kotawaringin Barat tidak sepenuhnya karena kualitas politik para calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi karena adanya ikatan antara masyarakat di dalamnya. Sikap politik semacam ini dapat menghambat berkembangnya sistem politik di Kotawaringin Barat itu sendiri, meskipun sebenarnya primordialisme itu sendiri adalah bukan sesuatu yang buruk.

2. Saran

a. Untuk Masyarakat Arut Selatan

Di tanamkan pendidikan politik sejak dini kepada anak-anak muda dan seluruh masyarakat agar paham tentang pentingnya perkembangan politik modern dan bagaimana politik yang baik itu semestinya. Agar nantinya bisa berkembang seperti kota-kota besar lainnya. Dan juga lebih bisa terbuka di dalam bidang politik, menerima cara berpolitik yang seharusnya tidak selalu berdasarkan kesamaan di dalam agama dan suku saja, agar demokrasi yang baik bisa berjalan dengan semestinya.

b. Untuk Penyelenggara

Untuk pihak penyelenggara Pilkada agar menyertakan masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah (khususnya di Arut Selatan), pihak KPU juga lebih terbuka kepada masyarakat tentang hasil pemilihan dan adil terhadap para calon maupun para pendukung calon, serta lebih kritis di dalam pelaksanaan janji-janji pemenang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat nantinya.

c. Untuk Penulis

Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan pengalaman di dalam berpolitik bahwa ikatan dan keagamaan tidak selalu menjadi hal yang menjadi dasar di dalam kemajuan masyarakat. Juga sebagai tolak ukur untuk membandingkan mana yang lebih baik antara politik secara primordial dan secara modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cooley, Charles Horton. 2010. *Sifat Manusia Dan Tatanan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung Alfabetha.
- Elkit, J dan Severson, *Journal Of Democracy*, Page 8 dalam prihatmoto, Joko J. *Mendemokratiskan Pemilu*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Firman. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indoneisa.
- Kountor, R. 2009. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Percetakan Buana Printing.
- Kencana S, Inu 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mauneti. 2004. *Identitas Dayak : Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta : Lkis.
- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Asfar. 2002. *Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Prilaku Pemilih*. dalam Jurnal Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Nordholt, Henk Schulte., dan Gerry Van Klinken. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Buku Obor: Jakarta. Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta, 1992 hal 181-182

Ramlan Surbakti.1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sudijono, Sastroatmodjo. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP, Semarang Press

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.

Tanasaldy, Taufiq. *Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat*. Jakarta : Buku Obor